

STRATEGI NEGARA-NEGARA G20 DALAM MENGANTISIPASI ANCAMAN KRISIS EKONOMI GLOBAL DI INDONESIA

Habibah Shobri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Anwar Syarif

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Wirda Hedyati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Boy Ridho Hamgara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Purnama Ramadani Silalahi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: habibahshobri985@gmail.com

***Abstract.** The purpose of this research is to find out the strategies of the G20 countries in anticipating the threat of the global crisis in Indonesia. This study uses qualitative methods with a descriptive approach to be able to describe in depth. The G-20 believes that a solution to the economic crisis requires continuous global cooperation. Through this collaboration, the best ways to resolve the crisis are formulated, both what must be done by each member country of the G-20 and what must be done by and through international financial institutions. In addition, being in the G-20 provides an opportunity for Indonesia to take a closer look at how developed countries make policies and then implement them in Indonesia if deemed good and appropriate. Each country must pursue a number of policies in an effort to respond to the crisis through fiscal stimulus, stimulate recovery of economic growth again in the crisis era, and then strive for economic stability that is resistant to similar crises in the future through strengthening the domestic financial sector.*

Keywords: G20, Economic Crisis, Global

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi negara-negara G20 dalam mengantisipasi ancaman krisis global di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk dapat mendeskripsikan secara mendalam. G-20 meyakini bahwa solusi terhadap krisis ekonomi memprasyaratkan kerja sama yang bersifat global, secara terus menerus. Melalui kerja sama ini dirumuskan cara-cara yang terbaik untuk penyelesaian krisis, baik yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota G-20 maupun yang harus dilakukan oleh dan melalui lembaga-lembaga finansial internasional. Di samping itu, berada dalam G-20 memberikan peluang bagi Indonesia untuk melihat lebih dekat bagaimana negara-negara maju untuk membuat kebijakan-kebijakan dan kemudian menerapkannya di Indonesia jika dipandang baik dan tepat. Setiap negara harus mengupayakan sejumlah

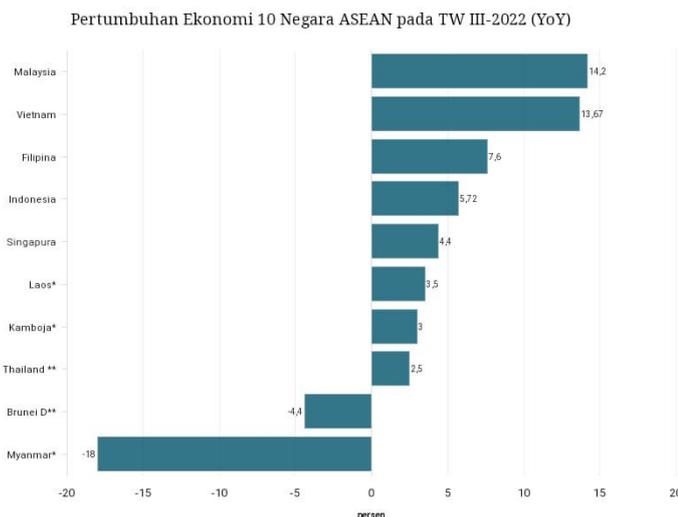
kebijakan dalam upaya merespons krisis melalui stimulus fiskal, merangsang pemulihan pertumbuhan ekonomi kembali di era krisis, dan kemudian mengupayakan stabilitas perekonomian yang tahan terhadap krisis serupa di masa yang akan datang melalui penguatan sektor keuangan domestik

Kata kunci: G20, Krisis Ekonomi, Global

LATAR BELAKANG

Berdasarkan laporan *World Economic Prospects* Juni 2020 Bank Dunia, ekonomi global akan berkontraksi sebesar 5,2% pada tahun 2020. Dengan penurunan yang lebih besar dari sejak tahun 1870, angka ini merupakan resesi paling parah sejak Perang Dunia Kedua. Langkah-langkah ketat negara untuk melindungi penduduknya dari ancaman penularan virus yang tidak terkendali telah mengguncang semua bidang kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan internasional, pariwisata, ekspor komoditas, dan pendanaan eksternal. Meskipun kerentanan negara sangat bervariasi, negara-negara miskin seringkali lebih rentan terhadap guncangan eksternal. (Wiwiek Astuti, 2020)

Sebenarnya, krisis keuangan tahun 2008 telah menempatkan perekonomian internasional pada posisi yang sangat genting. Banyak negara di seluruh dunia, terutama negara-negara kaya, mengalami penurunan ekonomi. Krisis ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 2008 diawali dengan krisis ekonomi di Amerika Serikat yang kemudian meluas ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Malapetaka ekonomi Amerika dipicu oleh promosi konsumerisme (*propensity to Consume*). Mengingat negara-negara kaya tersebut merupakan pasar terbesar dan tujuan utama ekspor barang-barang dari negara-negara berkembang, situasi ini menjadi ancaman berat bagi perekonomian negara-negara tersebut. Krisis keuangan global berdampak parah pada Indonesia yang terlihat dari menurunnya pembiayaan investasi, melambatnya penciptaan lapangan kerja, dan menurunnya daya beli masyarakat. Pada akhirnya, hal ini akan memperlambat pembangunan ekonomi. Inisiatif efisiensi pengusaha dalam keadaan ini dapat mengakibatkan gelombang PHK. (Iman Sugema, 2012)



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi 10 Negara ASEAN pada TW III 2022

Sumber : Databoks.katadata

Perekonomian Malaysia pada periode Juli-September 2022 melesat di atas 14% karena tingginya permintaan ekspor dan konsumsi domestik. ekonomi Vietnam pada kuartal III 2022 tumbuh 13,67% (yoy). Diikuti ekonomi Filipina tumbuh 7,6% (yoy). Demikian pula ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% (yoy) dan ekonomi Singapura tumbuh 4,4% (yoy). Berikutnya, ekonomi Thailand pada triwulan II 2022 tumbuh 2,5% (yoy), sedangkan ekonomi Brunei Darussalam mengalami kontraksi sedalam 4,4% (yoy). Adapun ekonomi Laos dan Kamboja masing-masing tumbuh sebesar 3,5 dan sebesar 3% pada tahun 2021. Sedangkan, ekonomi Myanmar mengalami kontraksi sedalam 18% pada tahun 2021.

Di tengah ketidakpastian global yang menekan pemulihan ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga kinerjanya yang sangat baik. Meski International Monetary Fund (IMF) menurunkan prediksi ekonomi dunia dari 3,6% menjadi 3,2% pada Juli 2022, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat tinggi di angka 5,3%. Kinerja IHSG juga cukup baik dalam menghadapi tekanan dunia dan penurunan indeks pasar global, dengan IHSG mencatatkan pengembalian 6% (ytd) di 6.982,5 pada 10 Oktober 2022. Meskipun terjadi guncangan, indikator eksternal Indonesia tetap cukup solid. *Indeks Volatilitas* Indonesia berada di kisaran 30,49, masih dalam batas nilai indikasi 30. *Level indeks Exchange Market Pressure* (EMP) per September 2022 adalah 1,06, masih di bawah *level one barrier* 1,78. Demikian pula,

rasio CDS Indonesia lebih rendah dibandingkan Meksiko, Turki, Brasil, dan Afrika Selatan. (Kementerian koordinator bidang perekonomian, 2022)

KAJIAN TEORITIS

G20

G20 atau *Group of Twenty* adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. (Dahlan, 2022)

Jenis Pertemuan KTT G 20

1. Jenis Pertemuan KTT (*Summit*) Pertemuan Inilah puncak dari proses pertemuan G20, pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan.
2. *Ministerial & Deputies Meetings*/Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi Diselenggarakan di masing-masing area fokus utama Forum. Di bidang keuangan, rapat menteri dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang dengan rapat menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Sedangkan konferensi perwakilan disebut Konferensi Perwakilan Fiskal dan Bank Sentral.).
3. Kelompok Kerja/*Working Groups*, Kelompok kerja, yang terdiri dari para ahli dari negara-negara G 20, membahas isu-isu spesifik terkait dengan agenda G 20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam bagian kementerian dan akhirnya ke dalam KTT.
4. Alur Kerja G 20 Forum G 20 membahas 2 arus isu yakni *finance track* dan *sherpa track*.

a. *Finance Track*

Fokus isu yang dibahas pada arus ini adalah ekonomi dan keuangan, seperti: kebijakan fiskal, moneter dan rii, Investasi infrastruktur, regulasi keuangan, Inklusi keuangan, perpajakan internasional, pembahasannya dilakukan Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara anggota.

b. Sherpa Track

Fokus isu yang dibahas pada arus ini lebih luas, seperti : geopolitik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, kesetaraan gender, pembahasannya dilakukan oleh kementerian terkait pada tingkat Menteri masing-masing negara anggota.(Setiawan et al., 2022)

Krisis ekonomi global

Krisis keuangan (*financial crisis*) biasanya diartikan sebagai situasi dimana lembaga keuangan atau aset kehilangan nilai dalam jumlah yang besar. Perkembangan selanjutnya di abad 19 dan 20, krisis keuangan juga dianalogikan dengan krisis yang melanda dunia perbankan dan sejumlah resesi dengan dampak yang juga besar. Termasuk dalam kategori krisis keuangan ini antara lain adalah krisis di bursa saham, krisis mata uang dan juga *sovereignty*.(Hamid, 2009). Krisis keuangan global dengan cepat berkembang menjadi krisis global yang bukan hanya berdampak pada sistem keuangan namun juga pada pasar tenaga kerja dan tingkat keamanan dan sosial serta kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di berbagai negara berkembang yang terkena dampak krisis baik secara langsung dan tidak langsung.(Ismail & Indrawati, 2020)

Krisis ekonomi global adalah peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan atau degresi dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi global terjadi karena permasalahan ekonomi pasar dunia yang tidak dapat dielakkan sebab kebangkrutan maupun adanya situasi ekonomi yang berantakan. Sektor yang terkena imbas krisis ekonomi global adalah seluruh sektor bidang kehidupan. Bagi Indonesia, dampak negatif dari krisis finansial global yang berlarut-larut sudah mulai terasa. Dampak ini sudah mulai terlihat dari pembiayaan kegiatan investasi yang semakin menciut, dan penyerapan tenaga kerja yang melambat. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat turun, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi pun menurun. Dalam kondisi seperti ini para pengusaha akan memikirkan langkah efisien untuk mengurangi dampak kerugian suatu perusahaan.(Wening Purbatin Palupi Soenjoto, 2017)

Krisis global ini juga dipicu oleh praktik ekonomi spekulatif. Dengan memainkan perbedaan tingkat suku bunga yang signifikan antar negara membuat para pialang keuangan seenaknya mengeruk keuntungan melalui investasi uang panas. Aliran uang

panas dari satu negara ke negara lain dalam jumlah yang luar biasa besarnya dan berlangsung sangat cepat. Prilaku bisnis yang menghalalkan segala cara dan tidak peduli aturan bahkan etika bisnis merupakan fenomena yang terjadi dalam era pasar bebas. Pemain yang menguasai pasar bisa melakukan berbagai tindakan untuk mengendalikan pasar. Dari kenyataan itu, akar utama krisis keuangan di AS karena sifat buruk manusia terhadap harta-tamak, rakus, dan menghalalkan segala cara yang berbasis ribawi. (Majid, 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan dan analisis data non-tradisional penyelidikan kuantitatif hubungan sosial dan deskripsi realitas respons. Data diperoleh melalui studi literatur melalui membaca dan belajar mengkaji berbagai jenis literatur, seperti dokumen, jurnal, dan data publikasi dari Kementerian Keuangan serta situs web resmi memberikan informasi penelitian yang relevan. Sementara analisis data dilakukan dengan mereduksi, klasifikasi, yang berarti menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menanggapi kondisi ekonomi global terkini, anggota G20 menyampaikan kekhawatiran tentang tekanan inflasi yang lebih luas dan persisten. Kondisi itu akan menyebabkan beberapa bank sentral menaikkan kebijakan suku bunga mereka yang pada gilirannya akan mengakibatkan pengetatan likuiditas global yang lebih cepat dari perkiraan. Anggota G20 juga menyatakan, bahwa konflik geopolitik telah membuat pertumbuhan dan pemulihan global jauh lebih kompleks. Hal itu berpotensi melemahkan upaya dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang sudah ada sebelumnya, termasuk kesehatan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, utang yang tinggi di negara-negara rentan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dari komite ad hoc ke lembaga permanen Deklarasi di Pittsburg menegaskan bahwa pemimpin G-20 bertekad untuk membuat kehadiran G-20 lebih bersifat permanen. Pemimpin-pemimpin G-20 menyadari bahwa penyelesaian krisis ekonomi membutuhkan solusi yang permanen bukan solusi ad hoc. Untuk itu diperlukan lembaga

yang bersifat permanen pula yang memiliki tugas utama untuk membangun arsitektur finansial global yang tahan terhadap krisis.

G-20 meyakini bahwa solusi terhadap krisis ekonomi memprasyaratkan kerjasama yang bersifat global, secara terus menerus. Melalui kerjasama ini dirumuskan cara-cara yang terbaik untuk penyelesaian krisis, baik yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota G-20 maupun yang harus dilakukan oleh dan melalui lembaga-lembaga finansial internasional. Setiap negara harus mengupayakan sejumlah kebijakan dalam upaya merespon krisis melalui stimulus fiskal, merangsang pemulihan pertumbuhan ekonomi kembali di era krisis, dan kemudian mengupayakan stabilitas perekonomian yang tahan terhadap krisis serupa di masa yang akan datang melalui penguatan sektor keuangan domestik. (Hermawan et al., 2011)

Sebagai bukti konkret dari anggota Negara G20 mendukung agenda utama Presidensi Indonesia “*Recover Together, Recover Stronger*”, Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dalam FMCBG keempat mengambil enam langkah nyata sebagai berikut:

1. Ekonomi Global

G20 memperkuat koordinasi dan aksi nyata yang diselaraskan pada isu penting bagi stabilitas ekonomi global termasuk ketahanan pangan dan energi. Melihat kondisi global saat ini, G20 menekankan pentingnya menjaga respon kebijakan fiskal yang mampu bergerak cepat dan fleksibel, serta langkah-langkah pengendalian yang bersifat sementara dan tepat sasaran untuk menghindari tekanan inflasi yang tinggi. Dalam hal ini, G20 menegaskan kembali pentingnya kerja sama kebijakan makro untuk menjaga stabilitas keuangan, dan kebijakan fiskal jangka panjang yang berkelanjutan, serta melindungi risiko penurunan dan dampak negatif efek *spillover*. G20 juga menegaskan kembali pentingnya kebijakan makroprudensial, pembangunan berkelanjutan, dan transisi berkelanjutan. Selain itu untuk meningkatkan stabilitas harga dan menghindari *spillover*, G20 juga berkomitmen untuk mengkalibrasi laju pengetatan kebijakan moneter secara tepat.

2. Arsitektur Keuangan Internasional

G20 memperkuat komitmen untuk memastikan ketahanan arsitektur keuangan internasional jangka Panjang. G20 akan terus memantau risiko peningkatan volatilitas/fluktuasi arus modal, *spillover* negatif, dan kondisi pasar yang tidak

merata. Selain itu, G20 juga terus mendukung alokasi penyaluran *Special Drawing Right* (SDR) untuk membantu golongan yang paling rentan serta meningkatkan kapasitas sumber daya *Multilateral Development Banks* melalui tinjauan Kerangka Kecukupan Modal, dan di saat yang sama memastikan penerapan *Common Framework* pada *Debt Treatment* di luar *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI).

3. Peraturan Sektor Keuangan

G20 menegaskan kembali komitmen dalam regulasi dan pengawasan sektor keuangan untuk memperkuat sistem keuangan internasional. G20 terus memperkuat sektor keuangan global melalui peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik penilaian FSB mengenai pengawasan dan regulasi “*stablecoin*” global, serta aktivitas pasar asset kripto dan menerima panduan akhir oleh BIS CPMI dan IOSCO yang menegaskan bahwa prinsip untuk infrastruktur pasar keuangan berlaku dalam pentingnya pengaturan *stablecoin* yang sistematis.

4. Keuangan Berkelanjutan

G20 menegaskan komitmen untuk memperkuat agenda keuangan berkelanjutan dan mendukung transisi ekonomi hijau. Untuk mendukung infrastruktur yang transformatif, G20 mendukung *Infra Tracker 2.0* dan Ringkasan Studi Kasus G20 dalam *Infrastruktur Keuangan Digital: Masalah, Praktik dan Inovasi*. Anggota G20 juga mendorong kualitas investasi infrastruktur dengan mendiskusikan pembangunan *Quality Infrastructure Investment (QII) Indicators*.

Para anggota G20 juga mendukung secara sukarela dan tidak terikat dengan *Global Infrastructure (GI) Hub Framework* tentang cara terbaik dalam menjangkau partisipasi pihak swasta guna meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, dengan tetap mempertimbangkan situasi negara, serta akan menambahkan investasi dari sumber lain, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh *Multilateral Development Banks (MDBs)*.

5. Investasi Infrastruktur

G20 berkomitmen untuk merevitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau. G20 menekankan pentingnya kemajuan dalam agenda keuangan yang berkelanjutan dan mendukung transisi ekonomi hijau guna mencapai

target bebas karbon. Selain itu, pada tahun ini Presidensi G20 Indonesia mendukung Laporan Ekonomi Berkelanjutan G20 yang mana mewujudkan 3 agenda utama:

1. pembangunan kerangka transisi keuangan yang memperhatikan aktivitas transisi iklim, termasuk transisi energi, dan meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan.
2. memperbesar keuangan berkelanjutan dengan berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan.
3. mendiskusikan pengungkit kebijakan yang menginsentifkan keuangan dan investasi serta mendukung transisi.

6. Perpajakan Berkelanjutan

G20 menegaskan kembali komitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan paket pajak internasional dua pilar G20/OECD. Para anggota mendukung pekerjaan yang tengah berlangsung pada Pilar Satu dan menyambut penyelesaian dari *Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules* pada Pilar Dua. Selain itu, para anggota menyerukan *OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* untuk merampungkan Pilar Satu, dan dengan menandatangani Konvensi Multilateral pada paruh pertama 2023, dan untuk menyelesaikan negosiasi Aturan Subjek Pajak (*Subject to Tax Rule/STTR*) dalam Pilar Dua yang akan memungkinkan pembangunan instrumen multilateral untuk implementasinya.

Selanjutnya para anggota juga menegaskan tujuan G20 untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sehubungan dengan *G20 Ministerial Symposium on Tax and Development* pada Juli 2022, dan memperhatikan *G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Tax*, serta mendukung perkembangan yang dicapai dalam mengimplementasikan standar transparansi pajak yang disetujui secara internasional.

Indonesia menunjukkan komitmennya sebagai presidensi untuk mendorong partisipasi aktif dari semua anggota untuk mewujudkan hasil nyata sebagaimana dalam tema G20 kali ini yaitu "*Recover Together, Recover Stronger*". Melalui tema tersebut, Indonesia berhasil mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.(Alfakih, 2022). Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa keterlibatannya dalam G-20 memberi peluang bagi Indonesia untuk semakin mendunia: "Inilah saatnya prestasi, produk, budaya dan ide-ide Indonesia semakin menjadi bagian dari dinamika di tingkat global". Peningkatan

kinerja diplomasi Indonesia yang bebas, aktif dan transformatif diakui oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai keharusan untuk menciptakan peluang bagi realisasi kepentingan nasional Indonesia. Di samping itu, berada dalam G-20 memberikan peluang bagi Indonesia untuk melihat lebih dekat bagaimana negara-negara maju untuk membuat kebijakan-kebijakan dan kemudian menerapkannya di Indonesia jika dipandang baik dan tepat.

Peran strategis Indonesia dalam G20 dengan ketangguhannya secara empiris telah dibuktikan dengan kemampuan Indonesia melewati berbagai krisis seperti krisis ekonomi 1998, krisis Covid-19, mitigasi krisis yang telah teruji dalam membangun modal sosial mendorong terbentuknya jaring pengaman sosial di level masyarakat. Selain kekuatan masyarakat, juga didukung oleh bauran kebijakan pemerintah untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang telah terbukti tangguh melewati badai dan mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini ditandai dengan kinerja perekonomian Indonesia yang masih tumbuh positif di tengah tren perlambatan ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72% (*year-on-year/yoy*) pada kuartal III-2022. Capaian tersebut tergolong cukup tinggi di antara negara G20, bahkan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. (Cahyono, 2022)

KESIMPULAN

G-20 meyakini bahwa solusi terhadap krisis ekonomi memprasyaratkan kerjasama yang bersifat global, secara terus menerus. Melalui kerjasama ini dirumuskan cara-cara yang terbaik untuk penyelesaian krisis, baik yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota G-20 maupun yang harus dilakukan oleh dan melalui lembaga-lembaga finansial internasional. Setiap negara harus mengupayakan sejumlah kebijakan dalam upaya merespon krisis melalui stimulus fiskal, merangsang pemulihan pertumbuhan ekonomi kembali di era krisis, dan kemudian mengupayakan stabilitas perekonomian yang tahan terhadap krisis serupa di masa yang akan datang melalui penguatan sektor keuangan domestik. Peran strategis Indonesia dalam G20 dengan ketangguhannya secara empiris telah dibuktikan dengan kemampuan Indonesia melewati berbagai krisis seperti krisis ekonomi 1998, krisis Covid-19, mitigasi krisis yang telah teruji dalam membangun modal sosial mendorong terbentuknya jaring pengaman sosial di level masyarakat. Selain kekuatan masyarakat, juga didukung oleh bauran

kebijakan pemerintah untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang telah terbukti tangguh melewati badai dan mendapatkan pengakuan internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Alfakih, S. (2022). *Pembahasan solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi global melalui FMCBG-20*. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1162-1490/umum/kajian-opini-publik/pembahasan-solusi-dalam-menghadapi-tantangan-ekonomi-global-melalui-fmcbg-g20>
- Ampri, I. (2014). *Arsitektur Keuangan Internasional: Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global*.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255-274.
- Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 131-148.
- Cahyono, E. (2022). *G20 Secercah harapan di tengah badai global*. https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_secercah_harapan_di_tengah_badai_global
- Dahlan, R. (2022). *Ekonomi Sirkular dan pembangunan Berkelanjutan*. Jejak Pustaka.
- Elisabeth, A. (2016). *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamid, E. S. (2009). Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *La_Riba*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art1>
- Hermawan, Y. P. (Yulius P., Friedrich Ebert Stiftung (Indonesia), & Universitas Katolik Parahyangan. (2011). *The role of Indonesia in the G-20: background, role, and objectives of Indonesia's membership : G-20 research project*.
- Ismail, M., & Indrawati, Y. (2020). *Paradigma Baru Kebijakan Moneter: Menakar Pelajaran Krisis Keuangan Global*. CV Pustaka Abadi.
- Majid, M. S. A. (2015). Krisis Ekonomi Dan Solusinya Dalam Perspektif Islam: Analisis Krisis Ekonomi Global 2008. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 85–97.
- Perencanaan, K., Nasional, P., & Republik, B., Abstraksi, I. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan*

Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 240–252.

<https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>

Rasyida, F. (2022). Dakwah Budaya Bantuan dan Pemberian Sebagai Solusi Krisis Ekonomi Global Study Kasus Investasi Zakat BAZNAS Indonesia. *Jurnal Al-Hikmah*, 20(1), 21–32. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v20i1.83>

Rusastra, I. W. (2011). Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 4(2), 87-102.

Setiawan, H., Sanusi, & Rahayu, K. (2022). *Masa depan Uang digital di Indonesia Pasca KTT G20*. PT Nasya Expanding Management.

Sugema, I. (2012). Krisis keuangan global 2008-2009 dan implikasinya pada perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 17(3), 145-152.

Wening Purbatin Palupi Soenjoto. (2017). Mengkaji Krisis Ekonomi Global Menurut Perspektif Islam. *Tafaqquh*, 5, 34–54.

<https://doaj.org/article/3fe3c30b6a7d45e8a323483681f4023d>